

PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 2025

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAFF PENGELOLA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Maka ditunjuklah Pegawai yang dianggap cakap dan mampu sesuai bidang tugasnya sebagai Pejabat yang diberi kewenangan terkait operasional kantor Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staff Pengelola;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang pengangkatan dan penetapan pejabat yang terkait pelaksanaan operasional kantor yaitu kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, Dan staff pengelola bagian anggaran 076 tahun anggaran 2025

CATATAN : Undang-Undang ini berlaku pada 02 Januari 2025